



**BAPPENAS**

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

# e-klipping

*Kumpulan Berita Harian Media Online  
(ePaper)*

SUBJEK

EKONOMI

Kamis, 13 November 2024

**BIRO HUMAS, KEARSIPAN DAN TATA USAHA PIMPINAN**  
**Perpustakaan**  
**2024**

## **Daftar Isi**

1. PROGRAM JKN BERDAMPAK SIGNIFIKAN PADA EKONOMI – *Media Online Kompas*
2. PENDAPATAN HOTEL BAKAL TERGERUS PEMANGKASAN PERDIN – *Media Online Bisnis Indonesia*
3. RPJMN PRABOWO HARUS REALISTIS – *Media Online Bisnis Indonesia*
4. IKUT MAKAN GIZI GRATIS, BUMDES DAPAT TINGKATKAN EKONOMI DESA – *Media Online Investor Daily News*

## Program JKN Berdampak Signifikan pada Ekonomi

**JAKARTA, KOMPAS**—Penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dalam 11 tahun terakhir memiliki dampak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi regional. Secara empiris, keberlangsungan program yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan berkaitan juga dengan produktivitas dan daya konsumsi masyarakat.

Hal tersebut merupakan kesimpulan dari hasil studi yang dilakukan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia berjudul "Dampak Program Jaminan Kesehatan Nasional terhadap Ekonomi dan Kemiskinan" yang dirilis November 2024.

Peneliti LPEM Universitas Indonesia, Jahen F Rezki, menyebut, secara ekonomi makro, JKN memberikan dampak terhadap produk domestik bruto, baik regional maupun nasional, karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan konsumsi sekaligus membuka sejumlah kesempatan kerja di sektor-sektor yang terkait dengan jalannya program.

Hasil estimasi dari studi yang dilakukan pada 2016, 2020, dan 2023 menunjukkan bahwa terdapat asosiasi positif antara peningkatan utilisasi

kesehatan dan peningkatan angka harapan hidup. Adapun angka harapan hidup berdampak langsung terhadap produktivitas dan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita.

"Kami menemukan bukti yang menunjukkan dengan adanya kenaikan jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan, akan meningkatkan kegiatan ekonomi," ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (12/11/2024).

Disampaikan oleh Jahen dalam seminar bertajuk "Capaian Cakupan Kesehatan Semesta" yang berlangsung di Gedung Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Jakarta, Senin (11/11), oleh karena adanya program JKN, semakin mudah bagi masyarakat luas mendapatkan akses terhadap fasilitas kesehatan.

Oleh karena masyarakat semakin terekspos dengan fasilitas kesehatan yang berkualitas, kualitas kesehatan juga semakin baik. "Masyarakat jadi lebih teredukasi dengan kesehatan. Mereka bisa berkonsultasi dengan tenaga medis sehingga mereka menjadi sumber daya manusia yang lebih baik," ujarnya.

Jahen menambahkan, ketika kualitas kesehatan masyarakat membaik, produktivitas masyarakat semakin meningkat. Kesimpulan ini berlandaskan hasil estimasi studi

yang menunjukkan bahwa kenaikan jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan sebesar 10 persen di sebuah wilayah terasosiasi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi regional dan produktivitas tenaga kerja sebesar 0,1 persen.

Lewat keterangan tertulis, Selasa, Deputy Direksi Bidang Komunikasi Organisasi BPJS Kesehatan Irfan Humaidi mengatakan, sampai saat ini tingkat keaktifan peserta BPJS Kesehatan 79,37 persen atau 219 juta peserta. Sementara jumlah peserta yang tidak aktif 57 juta peserta.

Dari jumlah yang tidak aktif membayar iuran, 42 juta peserta yang berstatus nonaktif tanpa tunggakan iuran karena mutasi berasal dari segmen peserta. Adapun sebanyak 15 juta peserta tidak aktif dan menunggak iuran.

Dalam meningkatkan keaktifan peserta, lanjut Irfan, BPJS Kesehatan menghadirkan program Rencana Pembayaran Bertahap BPJS Kesehatan (Rehab) melalui aplikasi Mobile JKN atau *care center* 165.

"Program Rehab BPJS Kesehatan yang memberikan keringanan dan kemudahan bagi peserta segmen pekerja bukan penerima upah/mandiri yang memiliki tunggakan iuran untuk dapat melakukan pembayaran iuran secara bertahap," ujarnya. (DIM)

# Bisnis Indonesia

REFERENSI BISNIS TERPERCAYA

RABU, 13 NOVEMBER 2024

## PENDAPATAN HOTEL BAKAL TERGERUS PEMANGKASAN PERDIN

Bisnis, JAKARTA — Industri perhotelan nasional diproyeksikan kehilangan pendapatan hingga Rp8,3 triliun menyusul kebijakan penghematan anggaran perjalanan dinas minimal 50% dari sisa pagu belanja perjalanan dinas pada tahun ini.

Artha Adwenty & Ni Luh Anggia  
redaksi@bisnis.com

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menyampaikan, pemangkasan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) terhadap perjalanan dinas berdampak serius terhadap hotel. Selama ini, menurutnya, pangsa pasar pemerintah cukup besar untuk industri perhotelan.

"Dampaknya serius terhadap industri perhotelan, karena pangsa pasarnya pemerintah itu cukup besar," katanya kepada *Bisnis*, Selasa (12/11).

Dia menuturkan, pangsa pasar pemerintah untuk hotel bintang 3 dan 4 sekitar 40%, sedangkan hotel bintang 5 memiliki pangsa pasar sekitar 10%.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2023, dia menyebutkan total jumlah kamar untuk hotel bintang 3 dan 4 di Indonesia mencapai 257.208 unit kamar.

Bila diasumsikan 40% dari kamar dengan rata-rata harga kamar Rp600.000 dan tingkat okupansi 52%, imbuhnya, potensi pendapatan tahunan untuk hotel bintang 3 dan 4 diperkirakan mencapai Rp14,1 triliun.

Untuk hotel bintang 5, lanjutnya, jumlah total kamar mencapai 50.813 unit kamar di seluruh Indonesia. Dengan pangsa pasar pemerintah sebesar 10%, potensi pendapatan dari hotel bintang 5 diperkirakan mencapai Rp2,4 triliun dengan tingkat okupansi 52%, dan harga per malam Rp2,5 juta.

Jika dijumlahkan, dia menyatakan, potensi pendapatan yang dapat dihasilkan dari kegiatan pemerintah di hotel bintang 3,

4, dan 5 adalah sekitar Rp16,5 triliun per tahun.

Dengan pemotongan anggaran perjalanan dinas hingga 50%, tegasnya, total pendapatan yang bisa diperoleh hotel dari kegiatan pemerintah berkurang menjadi sekitar Rp8,3 triliun.

"Kalau dipotong 50%, berarti tinggal sekitar Rp8,3 triliun. Itu tentu akan berdampak besar."

Selain mengancam pendapatan industri perhotelan, Hariyadi menyatakan pemangkasan anggaran perjalanan dinas juga turut berdampak terhadap penurunan mata rantai yang ada di industri ini, seperti usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) hingga vendor operasional. "Itu kena semuanya."

Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) Irfan Setiapatra membeberkan dampak kebijakan Kementerian Keuangan membatasi anggaran perjalanan dinas (perdin) pejabat K/L.

Menurutnya, kebijakan tersebut belum memberikan dampak bagi kinerja GIAA, meskipun pemesanan tiket dari korporasi termasuk salah satu yang banyak dilakukan.

"Belum berdampak [kebijakan ke kinerja GIAA]," kata Irfan.

Saat ini, dia menyatakan, ada saja yang melakukan perjalanan bisnis. Menurutnya lebih memungkinkan untuk mengurangi rapat yang tidak perlu dibandingkan dengan mengurangi perjalanan bisnis.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam surat Nomor S-1023/MK.02/2024 menginstruksikan semua kementerian dan lembaga untuk melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran (TA) 2024.

Dalam suratnya, Bendahara Ne-

gara itu meminta kementerian dan lembaga melihat kembali kegiatan yang memerlukan belanja perjalanan dinas pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2024 yang dapat dihemat dengan tetap menjaga efektivitas pencapaian target sasaran program masing-masing kementerian dan lembaga.

"Terhadap belanja perjalanan dinas tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan penghematan minimal 50% dari sisa pagu Belanja Perjalanan Dinas pada DIPA TA 2024 terhitung sejak surat ini ditetapkan," tulis Sri Mulyani dalam suratnya tertanggal 7 November 2024.

Adapun, surat yang dikeluarkan oleh Sri Mulyani merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet pada 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024. Dalam arahnya, Kepala Negara meminta agar kementerian dan lembaga melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas TA 2024.

Setidaknya, terdapat tujuh poin yang harus diperhatikan kementerian dan lembaga terkait dengan efisiensi belanja perjalanan dinas. Langkah tersebut diharapkan dapat menghemat minimal 50% dari sisa pagu Belanja Perjalanan Dinas.

Dalam surat tersebut yang ditujukan kepada para menteri di Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, para Kepala Lembaga Pemerintah non-Kementerian, dan Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, tercantum tujuh poin seputar penghematan tersebut.

Namun, Sri Mulyani mengecualikan penghematan perjalanan dinas bagi unit yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya memerlukan perjalanan dinas.

Selain itu, belanja perjalanan dinas tetap seperti untuk biaya

perjalanan dinas bagi penyuluh pertanian, juru penerang, dan penyuluh agama, serta biaya perjalanan dinas pada kedudukan besar/atas.

Sri Mulyani turut meminta para K/L untuk melakukan revisi terkait dengan belanja perjalanan dinas dalam DIPA 2024.

### TIDAK SULIT

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendukung langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk menghemat perjalanan dinas minimal 50% pada sisa tahun ini. Sekretaris Utama Kementerian PPN/Bappenas Teni Widuriyanti meyakini pemotongan anggaran perjalanan dinas hingga setengah bukanlah suatu yang sulit.

"Kan cuma 50%, yang *enggak* penting-penting disisir lagi saja, kalau *enggak* terlalu mendesak kembalikan," jelas Teni.

Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susi Wijono Moegiarto menuturkan, edaran Kemenkeu terbit atas arahan Presiden Prabowo dalam rangka menyediakan dukungan anggaran pada pemerintahan baru.

"Transisi pemerintahan tidak mudah, karena ada transisi kelembagaan baru. Kemudian, ada juga nanti bagaimana APBN yang didesain tahun ini untuk tahun depan juga harus bisa *support* program prioritas Presiden."

Susi menjelaskan, arahan untuk efisiensi perjalanan



**Dampaknya serius terhadap industri perhotelan karena pangsa pasarnya pemerintah itu cukup besar.**

dinas bukan hanya terjadi baru-baru ini. Dia menyatakan sudah beberapa kali penghematan perdin diminta oleh Bendahara Negara sebelumnya.

Menurutnya, pemangkasan belanja perjalanan dinas yang dilakukan pada kuartal terakhir 2024 tidak akan berimbas pada kinerja belanja pemerintah, karena bukan belanja barang modal yang dihambat.

Untuk belanja pemerintah, khususnya barang modal yang umumnya dilakukan pada akhir tahun, dia menilai akan berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi 2024.

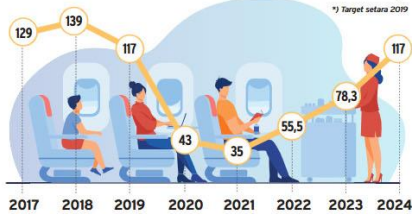
"Perkembangan APBN ini akan menjadi satu kunci untuk pertumbuhan ekonomi di tahun depan dan tadi mendorong keberhasilan program-program prioritas yang sudah dicanangkan Presiden."

(Annasa Rizki Karmalita) E



Sebaran Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Bintang Menurut Provinsi pada September 2024

### Jumlah Penumpang Angkutan Udara Domestik dan Internasional (orang)

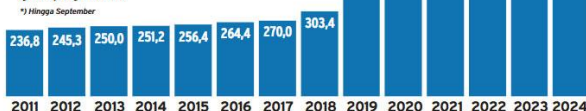


### Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar Hotel Klasifikasi Bintang di Indonesia (%)

Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des
2020	49,17	49,22	32,24	12,67	14,45	19,70	28,07	32,93	32,12	37,48	40,14	40,79
2021	30,35	32,40	36,07	34,63	31,97	38,55	22,38	25,07	36,64	45,62	47,83	51,57
2022	42,43	38,54	45,15	34,23	49,85	50,28	49,77	47,38	50,02	52,31	54,41	56,90
2023	44,86	47,83	46,26	41,37	49,03	53,67	54,63	52,46	53,02	53,02	56,7	56,72
2024	46,72	39,32	34,09	47,14	54,03	54,60	54,40	54,80	54,68	-	-	-



### Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara (juta perjalanan)



Sumber: Kementerian Pariwisata, BPS, diolah

# Bisnis Indonesia

REFERENSI BISNIS TERPERCAYA

RABU, 13 NOVEMBER 2024

## RPJMN Prabowo Harus Realistis

Bisnis, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus realistis dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029, berkaca pada pelaksanaan RPJMN 2020—2024 yang tak mencapai target.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie O.F.P. mengatakan hasil realisasi RPJMN 2020—2024 hendaknya menjadi acuan dalam penetapan RPJMN 2025—2029.

“Kita perlu tahu bahwa lima tahun kemarin itu apa saja yang kita enggak tercapai. Jangan diulang dalam penyusunan RPJMN ke depan,” ujar Dolfie dalam rapat kerja Komisi XI DPR dengan Badan Pembangunan Nasional (Bappenas), Selasa (12/11).

Kementerian PPN/Bappenas memproyeksi tidak ada target indikator perekonomian yang

tercapai dalam periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, seperti yang sudah ditetapkan dalam RPJMN 2020—2024.

*Pertama*, RPJMN menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 6,2%—6,5% pada 2024. Namun, capaian pada 2023 hanya sebesar 5,05% sehingga Bappenas memperkirakan target pertumbuhan ekonomi RPJMN 2020—2024 tidak tercapai.

*Kedua*, RPJMN menargetkan pertumbuhan investasi di kisaran 6,6%—7% pada 2024, tetapi capaian pada 2023 hanya sebesar 4,4% sehingga Bappenas memperkirakan target pertumbuhan ekonomi RPJMN 2020—2024 tidak tercapai.

*Ketiga*, RPJMN menargetkan andil industri pengolahan di sebesar 21% pada 2024. Hanya saja, capaian pada 2023 hanya sebesar 18,67% sehingga Bap-

penas memperkirakan target pertumbuhan ekonomi RPJMN 2020—2024 tidak tercapai.

*Keempat*, RPJMN menargetkan tingkat pengangguran terbuka di kisaran 3,6%—4,3% pada 2024. Kendati demikian, capaian pada 2023 hanya sebesar 5,32% sehingga Bappenas memperkirakan target pertumbuhan ekonomi RPJMN 2020—2024 tidak tercapai.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pamubudy menyatakan evaluasi realisasi target-target RPJMN 2020—2024 akan menjadi dasar penyusunan RPJMN 2025—2029.

Dia juga menggarisbawahi bahwa akan ada perbedaan mendasar dalam penyusunan RPJMN 2025—2029 karena kini jumlah kementerian/lembaga makin banyak. *(Surya D.A. Simanjuntak)*

# INVESTOR DAILY

INDONESIA

RABU, 13 NOVEMBER 2024

## Ikut Makan Gizi Gratis, BUMDes Dapat Tingkatkan Ekonomi Desa

**JAKARTA, ID** – Para (BUMDes) di Indonesia didorong dapat terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu mengingat keterlibatan BUMDes dinilai dapat menciptakan putaran ekonomi di desa sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Oleh **Edu Rasyanto**

**A**dapun peluang yang bisa dimanfaatkan oleh BUMDes, yakni sebagai pemasok bahan baku untuk membuat makanan bergizi, kemudian sebagai penyedia transportasi untuk mendistribusikan makanan tersebut ke sekolah-sekolah, serta menyiapkan diri menjadi penyedia makanan bergizi siap konsumsi.

Demikian rangkuman pendapat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Menurut Kepala Badan Pengembangan dan Informasi (BPI) Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kemendes PDT Ivanovich Agusta, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kudus Fanny Dwi Arfana yang dihimpun *Investor Daily*, Selasa (12/11/2024).

"Tentu kita tidak mau desa jadi penonton, tidak mau jadi penikmat makan siangnya saja untuk anak sekolah ibu hamil atau anak dalam tumbuh kembang. Kita mau bahan baku itu dari desa, jadi putaran ekonomi berada di desa melalui BUMDes sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat," kata Yandri.

Dia menjelaskan, desa mesti menjadi tempat lumbung pangan ketahanan pangan, ketahanan energi swasembada air atau di desa tempat banyak produk-produk yang bisa di-

olah dalam rangka hilirisasi produk-produk desa. Dan, lanjut dia dari desa lah tempat untuk penyediaan bahan baku makan siang bergizi.

"BUMDes-BUMDes akan tumbuh bersama, itu bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat, jadi bukan sekedar menjawab nasib makan siang bergizi, tapi yang kita suap dan makan itu itu memang bahan baku itu dari desa," kata dia dilansir *Antara*.

Presiden Prabowo Subianto, kata Yandri, telah membuat program makan siang bergizi bukan hanya untuk meningkatkan SDM generasi emas tapi juga sekaligus membuat perputaran ekonomi akan sangat bergerak sampai ke tingkat desa.

Oleh karena itu, Mendes Yandri meminta seluruh kepala desa untuk memetakan potensi daerah masing-masing, tentang keterlibatan dalam penyediaan makan siang bergizi tersebut baik sebagai produsen komoditas pokok, industri pengolahan hingga hilirisasi.

"Semua bisa bergerak untuk menyuplai bahan baku makan siang bergizi, program itu besar sekali putaran ekonominya, baru dimulai dengan anggaran Rp71 triliun, nanti akan sampai ke angka hampir atau lebih dari Rp300 triliun. Artinya itu uang tiap hari untuk masak di dapur, tentu kita tidak mau desa jadi penonton," ujarnya.

Menurut Ivanovich Agusta, peluang itu terbuka karena Badan Gizi Nasional menetapkan pihak yang dapat menjadi pemasok pangan program yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu adalah koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

"Itu bisa digunakan untuk menggerakkan ekonomi rakyat jika lembaga yang ikut serta itu adalah koperasi dan BUMDes, ini kan orang desa," kata Ivan.

Menurut perkiraan, kata Ivan melanjutkan, setiap satu dapur yang menghasilkan makanan untuk program Makan Bergizi Gratis itu, atau yang disebut Satuan Pelayanan Gizi, jumlah uang yang akan dibelanjakan sekitar Rp35 juta hingga Rp40 juta membelanjakan setiap hari. "Jadi peluang yang sangat tinggi bagi desa," kata dia dikutip dari *Antara*.

Kemendes PDT pun akan mendorong BUMDes, terutama yang memang bergerak di bidang pemasok pangan, untuk memanfaatkan peluang tersebut.

Ivan mengatakan, Kemendes PDT akan mendukung BUMDes agar mumpuni menjadi pemasok pangan melalui sejumlah langkah, seperti percepatan fasilitasi badan hukum untuk BUMDes.

Diketahui, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh BUMDes apabila hendak menjadi pemasok pangan dalam program Makan Bergizi Gratis.

Di antaranya adalah nama BUMDes harus terdaftar secara resmi di Kemendes PDT, memiliki badan hukum, NPWP, dan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS) yang berkaitan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI

pertanian, perkebunan, peternakan.

Berikutnya, BUMDes juga harus memiliki produk komoditas atau jasa sesuai KBLI dan dimasukkan ke Katalog Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

### Kesiapan BUMDes

Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mulai mempersiapkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar bisa menjadi pemasok bahan pangan bagi unit pelayanan yang mengolah makanan hingga menyalurkannya.

"Kalaupun belum siap menjadi mitra yang memasok makanan siap saji, setidaknya BUMDes di Kudus bisa menjadi pemasok bahan baku yang dibutuhkan oleh pihak catering," kata Dwi Arfana di Kudus, Selasa (12/11/2024).

Dari 119 desa yang sudah membentuk BUMDes, kata dia, sebanyak 114 desa di antaranya sudah berbadan hukum, sedangkan tiga desa proses pengurusan badan hukum, dan dua belum mengurus badan hukumnya.

Kabid Pemberdayaan Masyarakat Dinas PMD Kudus Lilik Ngesti Widiasuryani menambahkan, pengurusan BUMDes di Kabupaten Kudus sudah dua kali mengikuti pertemuan via zoom dengan Kementerian Desa terkait peluang mereka menjadi pemasok pangan ataupun pengelola satuan pelayanan program makan bergizi gratis (MBG).

Adapun peluang yang bisa dimanfaatkan oleh BUMDes, yakni sebagai pemasok bahan baku untuk membuat makanan bergizi, kemudian sebagai penyedia transportasi untuk mendistribusikan makanan tersebut ke sekolah-sekolah, serta menyiapkan diri

menjadi penyedia makanan bergizi siap konsumsi.

Ia mengakui hampir semua BUMDes yang ada di Kabupaten Kudus memiliki usaha di bidang pelayanan masyarakat, mulai dari jasa pembuangan sampah rumah tangga, pembayaran pajak daerah, hingga jasa lainnya yang bertujuan memudahkan masyarakat.

Karena program makan bergizi gratis (MBG) merupakan program pusat yang bakal berlangsung secara terus menerus dan membutuhkan banyak penyedia jasa catering, maka BUMDes di Kudus didorong untuk mempersiapkan diri.

"Mereka harus bertindak cepat untuk menggali potensi usaha yang memungkinkan bisa mereka kerjakan, sehingga ketika tahun 2025 program BMG berjalan mereka juga bisa ikut bekerja sama sebagai pemasok salah satu bahan baku yang dibutuhkan catering atau membuat usaha catering," ujarnya dilansir *Antara*.

Untuk membuat usaha catering yang memungkinkan menjadi pemasok makanan bergizi, maka BUMDes juga harus memenuhi sejumlah persyaratan, seperti memiliki NPWP maupun nomor induk berusaha (NIB).

Selain itu, memiliki lahan sebesar 400 meter persegi, luas bangunan 200 meter persegi, memiliki jenis ruangan, alat-alat memasak yang ditentukan Badan Gizi Nasional dan mendapatkan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)/sertifikat ISO 22000/sertifikat halal/sertifikat HCCP.

Dokumen NKV merupakan sertifikat yang menunjukkan bahwa unit usaha produk hewan telah memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi. Sertifikat ini menjadi jaminan keamanan produk hewan yang akan dikonsumsi masyarakat.